

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. *Kementerian Keuangan*, 2, 1–42. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Pemerintah Indonesia. (1960). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara. *Peraturan Pemerintah*, 1.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06. (2016). Pengurusan Piutang Negara. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162*, 1–122. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, (2016).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelelang, (2014).
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara*. 135355.